

BAB III

KONSEP PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID

A. Pluralisme dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Sejarah merupakan bukti nyata bahwa bangsa kita -mulai kerajaan majapahit, mataram, kerajaan sriwijaya, kerajaan Islam Demak sampai pada lahirnya Indonesia- merupakan bangsa kaya akan budaya, suku, bahasa daerah, keyakinan dan agama.⁷⁴ Masyarakat telah menyakini sesuatu yang berada di luar diri manusia dan berpengaruh terhadap hidup manusia yaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan agama Hindu dan Budha yang datang dari India. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan, tidak ada perbedaan kasta dan dengan damai Islam tersebar di Indonesia sedangkan di lain pihak agama Budha dan Hindu telah mewarnai kebudayaan masyarakat saat itu. Proses pertemuan antara kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat dengan kebudayaan yang datang kemudian tidak dapat dihindari. Hal ini juga terjadi pada proses penyebaran agama, yang tentunya juga diwarnai oleh budaya masyarakat saat itu.

⁷⁴ Agama mempunyai kontribusi yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, *truth claim* atas nama agama sering dijadikan alasan kuat terjadinya konflik yang berkepanjangan misal: dari kerusuhan Poso, Ambon dan berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memerlukan solusi dan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat), dengan harapan kerusuhan dan konflik tidak terjadi lagi. Kerusuhan dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau dengan alasan apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam agama. Bukti ini menunjukkan bahwa masing-masing pemeluk agama belum secara penuh mengaplikasikan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Semua agama melarang kekerasan, pembunuhan serta menganjurkan sikap toleransi dan kasih sayang.

Lambat-laun kultur masyarakat yang telah diwarnai oleh hinduisme dan budhiisme mengalami proses akulturasi. Proses akulturasi budaya dan agama yang dalam waktu panjang menyebabkan kesulitan untuk memisahkan mana unsur budaya dan mana unsur agama, hal ini dikarenakan keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamaan.⁷⁵

Disebutkan di UUD'45 pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat (2) UUD' 45, di samping jaminan kebebasan beragama, keputusan yang fundamental ini juga merupakan jaminan tidak ada diskriminasi agama di Indonesia. Mukti Ali secara filosofis mengistilahkan dengan *agree in disagreement* (setujua dalam perbedaan).

Setiap agama tidak terpisah dari yang lainnya dalam kemanusiaan. Keterpisahan mereka dalam kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme yang merupakan watak dasar masyarakat manusia yang tidak bisa dihindari. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, dan sebagainya, Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini disadari oleh para *founding father* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan

⁷⁵ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Pluralisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antar alin dalam sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme, baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Pancasila, yang terdapat dalam Piagam Jakarta, pun dipahami dalam konteks menghargai kemajemukan dan pluralisme.

Untuk mendukung konsep pluralisme tersebut, diperlukan adanya toleransi antarsesama umat beragama. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi masih sering muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat Amerika dan negara-negara lain.

B. Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta idiologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, idiologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk

terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu.

Abdurrahman Wahid merupakan penyeru pluralitas, toleransi, pembela kelompok minoritas Cina Indonesia, dengan kata lain Abdurrahman Wahid adalah *non-chouvinis* sebagai figur yang memperjuangkan diterimanya kenyataan sosial budaya yang ada.

Menurut Gus Dur pluralisme maupun multikulturalisme bukanlah ide yang menyatakan semua agama sama dengan ajaran/aqidah yang dianut.⁷⁶ Namun kita semua menyadari dan mengakui, bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Karena perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari peretentangan dan keterpecah-belahan dari sebuah totalitas masyarakat.⁷⁷ Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan benih konflik dan perpecahan. Perbedaan justru dapat dijadikan sebagai alat untuk mempercepat pemahaman anugerah Tuhan yang begitu nyata untuk senantiasa merajut keharmonisan dan toleransi.⁷⁸

Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang pluralisme tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Josh McDowell bahwa pluralisme

⁷⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta : The Wahid Institute, 2006), hlm 135

⁷⁷ *Ibid.*....hlm 28

⁷⁸ Maman Imanulhaq Faqieh, *Fatwa dan Canda Gus Dur*, (Jakarta: Kompas,2010), hlm 149

adalah *"respecting others beliefs and practices without sharing them"* (menghormati keimanan dan praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta bersama mereka).⁷⁹

Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.⁸⁰ Latar belakang faham keIslaman tradisional *-faham ahlussunnah wal jama'ah-* serta pemikirannya yang liberal, Islam menurut Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa "embel-embel."⁸¹ Islam akan tetap ruh keIslaman menyatu dalam wajah nasionalisme, lebih lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pribumisasi Islam

Proses pertumbuhan Islam -sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama- tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini

⁷⁹ <http://nashir6768.multiply.com/journal/item/1>

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 145

⁸¹ Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata "saudara" tidak perlu diganti "ikhwan", "langgar" diganti "mushola", "sembahyang" diubah menjadi "shalat". Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidakpedean umat Islam.

budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.⁸² Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Agama dan budaya bagaikan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Teolog dan orang-orang yang beragama, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama dan budaya masing-masing memiliki basis ontologis yang berbeda, sekalipun keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama bagaikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasadnya.⁸³ Agama mengandung dogma dan ajaran keselamatan yang jelas dan tegas, yang bersifat maskulin namun ketegasan agama harus di formulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, feminim dan beradab.⁸⁴ Agama bagi Gus Dur adalah sumber inspirasi⁸⁵ Perbedaan ini tidak

⁸² Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 141

⁸³ Komaruddin Hidayat, *Wahyu dilangi Wahyu dibumi*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm 27.

⁸⁴ *Ibid...* hlm 28

⁸⁵ INCERS, *Beyond The Symbols "Jejak Antropologis Pemikiran & Gerakan Gus Dur"*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm 59

menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.⁸⁶ Lebih lanjut beliau (Abdurrahman Wahid) mengatakan:

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong.⁸⁷

Pribumisasi Islam bukan bermaksud jawanisasi⁸⁸ atau sinkretisme,⁸⁹

Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Pribumisasi juga bukan upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal. Karena, dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Selanjutnya, Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindari timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumusasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisi antara

⁸⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hlm. 117

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 118.

⁸⁸ Pribumisasi Islam bukanlah “*Jawanisasi*”, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri juga bukannya meninggalkan norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan.. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 119

⁸⁹ Sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama, tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membentuk Panteisme.

agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.⁹⁰

Gagasan Abdurrahman Wahid ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Sebab menurutnya, Arabisasi seperti itu bukan hanya potensial menghancurkan budaya-budaya lokal, tetapi juga bisa menghilangkan identitas suatu masyarakat. Orang terpaksa mengganti identitas. Bahkan Arabisasi juga mengandung semacam triumfalistik yang harus ditolak. Betapa tradisi-tradisi local Islam non-Arab dipandang sebagai tidak murni, sehingga harus dimurnikan dengan tradisi Arab Islam. Seakan ke-Islaman sama belaka dengan ke-Araban. Pandangan seperti ini merupakan simplikasi bahkan pembenaran terhadap Islam sendiri. Islam terperangkap hanya menjadi Islam Arab. Bagi Gus Dur jelas, Islam bukan Arab walaupun Islam pertama kali lahir di Arab. Dengan itu, Gus Dur melontarkan kritik terhadap sejumlah pihak yang mengidentifikasikan Islam dengan Arab.⁹¹

Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Abdul Moqsith Ghazali, *la yakhafu lawmatala'i*, (dalam kata pengantar)

kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.⁹²

“Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (*eskapisme*). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik.kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan substitusi”⁹³.

Bahkan Gus Dur menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi⁹⁴ kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistic*, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern atukah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai pemeluk agama yang baik dalam

⁹² Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm. 140

⁹³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 130

⁹⁴ Kongres kebudayaan yang diprakarsasi oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menunjukkan adanya campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaiknya dibiarkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 5-9

lingkup wawasan kebangsaan, menurut Abdurrahman Wahid yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.⁹⁵

Benar apa yang dikatakan Greg Barton bahwa: Abdurrahman Wahid merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Abdurrahman sangat kritis terhadap budaya tradisional.⁹⁶

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khoiro ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.⁹⁷

Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁹⁶ Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm xxxvi.

⁹⁷ Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 205-206

diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan “*aspirasi Islam*” menjadi “*aspirasi nasional*”.⁹⁸

“Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama.”⁹⁹

Islam yang merupakan agama¹⁰⁰ *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam dan non muslim dengan mempertimbangkan realita (pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta pengaruh globalisasi).

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 207

⁹⁹ Abdurrahman Wahid. *Pergulatan Negara...*, hlm. 85

¹⁰⁰ Agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan sosial, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia berkembang menurut pertimbangan dunia itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidaklah hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia (agama) telah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif (agama berusaha mempertahankan dirinya). Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 169.

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keIslaman dari pengaruh proses sekulerisasi.¹⁰¹ Kecenderungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam baru mampu menolak kemungkar, kebaktilan dan kemaksiatan dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas.¹⁰²

Gagasan “Pribumisasi Islam” dimaksudkan Gus Dur sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya (“adab) dengan norma (syari’ah), sebagaimana juga menjadi persoalan *ushul fiqih*.¹⁰³ Pribumisasi dengan demikian, menurut Gus Dur adalah suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi *ushul al-fiqh* dan *qowaid al-fiqh*.¹⁰⁴

Dalam proses ini Gus Dur pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keIslamannya. Al-qur’an harus tetap dalam bahasa arab, terutama

¹⁰¹ Sekulerisasi berarti : Upaya manusia untuk membatasi, memisahkan, memperkecil atau menghilangkan, membebaskan peran Tuhan dalam kehidupan manusia.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 38

¹⁰³ INCERS, *Beyond The Symbols “Jejak Antropologis Pemikiran & Gerakan Gus Dur”*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm 43

¹⁰⁴ *Ibid.*...hlm 44

dalam shalat, sebab hal ini merupakan norma. Sedangkan terjemahan al-qur'an hanyalah untuk mempermudah pemahaman bukan menggantikan al-qur'an itu sendiri.¹⁰⁵

Pribumisasi dipakai Gus Dur sebagai usaha untuk melakukan pemahaman terhadap nash atau ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk merekonsiliasi antara budaya lokal dan agama. Titik tolak dari upaya rekonsiliasi ini adalah menuntut agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dengan demikian, pribumisasi Islam yang digagas adalah bagaimana mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan gagasan pribumisasi Islam adalah agar terjadinya dialog Islam dan kebudayaan sehingga keduanya dapat saling menerima dan memberi, saling mengisi. Meski terdapat ketegangan di antara keduanya. Namun, hendaknya tidak ada upaya penaklukan atau hubungan menang kalah dalam hal ini. Sebagaimana dapat dibaca di tulisan-tulisan Gus Dur sebelumnya terutama makalah Al-Qur'an dalam pemahaman konteks sosial baru dalam bukunya Muslim di Tengah Pergumulan.

¹⁰⁵ *Ibid.....hlm 44*

Sampai disini, dapat dikatakan, bahwa perjuangan pribumisasi Islam yang diusung Gus Dur, adalah perjuangannya untuk mendialogkan Islam dengan masalah-masalah kemanusiaan misalnya kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kreatifitas manusia. Dengan rumusan pemikiran Gus dur, tentu saja agama harus menyikapinya secara manusiawi, dan tidak serta merta memberangus kreatifits manusia itu. Beliau menghargai hak-hak manusia, kebebasan berpikir, sambli membuang hal-hal yg tidak perlu atau bertentangan dengan agama secara perlahan.

2. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Abdurrahman Wahid. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini pada hakikatnya adalah persiapan kehidupan di akhirat. "*Wakhiratu khairu wabqa*", akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan manusia tarafnya tidak

boleh tetap, harus tetap ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat.¹⁰⁶

Ide demokratisasi Abdurrahman Wahid muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.¹⁰⁷

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang *inkonsistensi*: sering membuat manuver dan ide-ide yang membingungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun justru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarkan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan) serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi. Karena Gus Dur mempersoalkan klaim sejumlah

¹⁰⁶ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 85

¹⁰⁷ Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 199

pemikiran dan pemimpin dunia Islam yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling demokratis dan amat menghargai hak asasi manusia.¹⁰⁸

Apresiasi Gus Dur terhadap hak asasi manusia ternyata bukan dalam konsep saja, tetapi juga implementasinya dalam praktek, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Gus Dur juga menyuarakan pembelaan terhadap sejumlah kasus tertentu yang menyangkut hak asasi manusia seperti hak-hak kaum minoritas, penghormatan terhadap *non-muslim*, hingga kasus-kasus yang dipandang sebagai “ketidakadilan” sejumlah kelompok kaum Muslimin terhadap sesama Muslim lainnya.¹⁰⁹ Dari pandangan dan impressinya terhadap hak asasi manusia itu, jelas Gus Dur sebagai tokoh Islam punya paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai hak asasi manusia.¹¹⁰

Lebih lanjut, dalam rangka pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, ia tidak harus masuk dalam sistem tetapi di manapun dan kapanpun usaha pembelaan terhadap demokrasi dan keadilan terus dilakukakan. Ia secara tegas menolak bergabung dengan ICMI¹¹¹ dan memelopori berdirinya forum demokrasi (FORDEM)¹¹² sekaligus menjadi ketua Fordem. Ia sosok yang tak

¹⁰⁸ Abdurrahman Wahid, kata pengantar dalam buku *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta : The Wahid Institute, 2006), hlm xxi

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm xxiii

¹¹⁰ *Ibid*, hlm xxiv

¹¹¹ ICMI yang merupakan organisasi buatan pemerintah yang kebijakannya banyak dimonopoli oleh pemerintahan Soeharto ketika itu.

¹¹² Fordem sebagian besar beranggotakan orang-orang non-muslim, sehingga kedekatan Gus Dur dengan orang non-muslim banyak dicurigai oleh tokoh Islam sendiri. Ia dikatakan agen zionis, membela non muslim dan dianggap menghancurkan Islam. Jawaban yang dikemukakan Gus Dur

mau menyerah dan terkesan bandel, meskipun keberadaannya di Fordem mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan para cendekiawan muslim.

Nurcholis Majid¹¹³ mengatakan:

...kalau Gus Dur tidak masuk ICMI maka Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya.” Gus Dur segera menjawab, “sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya, basis intelektual saya itu di pesantren, kiai pondokan, sekali lagi bukan ICMI.”

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

“...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”¹¹⁴

Dalam konteks ke-Indonesi-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari’ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti

menjawab tuduhan itu sangat sederhana: saya justru berpegang pada al Qur’an dan Hadits Nabi bahwa, al Qur’an menekankan pentingnya perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang Kristen dan Konghucu. Lihat Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 28

¹¹³ Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004), hlm. 72.

¹¹⁴ Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 111.

persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law*, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya’ ad-Din Rais.¹¹⁵

“Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memedulikan kutipan dari injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa ayat-ayat al Qur’an kita pakai secara fungsional bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”¹¹⁶

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.¹¹⁷

¹¹⁵ Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, hlm.147

¹¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, hlm. 204

¹¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 115

3. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.

“...dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.”¹¹⁸

Pandangan Abdurrahman Wahid tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas.

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Abdurrahman Wahid memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan

¹¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 190

keturunan, perlindungan harta benda dan milik pribadi.¹¹⁹ Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

4. Prinsip Keadilan dan Egaliter

Demokrasi dikatakan berhasil jikalau warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraan (egalitarianisme) warga masyarakat baik di depan undang-undang, hukum maupun dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi gender, warna kulit, pribumi-keturunan, etnis, ideologi, dan agama.

“Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, *“wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan”*. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqh: *langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu*. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat”¹²⁰.

Dari uraian di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa perbedaan agama, budaya, etnis harus dipahami dengan sikap yang bijak dan arif dari semua pihak tanpa mengunggulkan kelompok sendiri sembari merendahkan

¹¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 180

¹²⁰ Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, hlm. 86

kelompok lain. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berbudaya dan beradab, aman dan damai.